



JANGAN “MENDUGA” UN CURANG!

ALAMSYAH

Dosen FISIP UNSRI &

Program MAP STISIPOL Chandradimuka

Kabar tak sedap datang dari pelaksanaan ujian nasional. Soal ujian nasional yang seharusnya *secret* diduga bocor (Sumatera Ekspres, 18 April 2010), guru diduga mengerjakan soal di malam hari (Sumatera Ekspres, 20 April 2010). Padahal, beberapa hari sebelumnya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan berkeyakinan beragam kecurangan sulit terjadi karena sistem pelaksanaan ujian nasional yang semakin baik (Sumatera Ekspres, 15 April 2011).

Tulisan ini hadir untuk menterjemahkan peristiwa di atas dengan beberapa teori yang berkembang dalam disiplin ilmu administrasi negara. Logikanya sederhana, karena pelaksanaan ujian nasional dilaksanakan oleh institusi birokrasi sebagai bagian dari pelayanan publik, maka prosesi tahunan dunia pendidikan di Tanah Air tersebut merupakan wahana kontestasi aktor-aktor tertentu untuk meraih kepentingan tertentu.

Kepentingan siapa

Ujian nasional tidak dilaksanakan di ruang hampa kepentingan. Sebaliknya, ia dilaksanakan dalam latar kelembagaan institusi birokrasi publik yang sarat dengan beragam kepentingan. Siapa dan apa kepentingan pihak-pihak tersebut?

Pihak yang paling berkepentingan dengan UN adalah pemerintah pusat (dalam hal ini diwakili Kementerian Pendidikan Nasional). Di kementerian ini, ada dua pihak yang saling terintegrasi satu sama lain, yakni (a) menteri pendidikan nasional yang diangkat dan dipilih presiden; dan (b) para pegawai negeri sipil (birokrat) yang diangkat melalui mekanisme *merit systems*.

Menteri pendidikan nasional berkepentingan untuk menyelenggarakan ujian nasional setiap tahun karena ia harus mengetahui perkembangan kualitas dan kuantitas pencapaian target ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’ sebagaimana diamanahkan konstitusi. Pergerakan indikator di sektor pendidikan akan dipertanggungjawabkan menteri pendidikan nasional kepada presiden yang mengangkatnya, DPR yang merepresentasikan rakyat, dan beragam kelompok kepentingan yang *concern* dengan dunia pendidikan yang mewakili masyarakat luas. Singkat kata, UN adalah salah satu alat ukur kinerja menteri pendidikan nasional.

Sementara itu, birokrat berkepentingan dengan pelaksanaan ujian nasional karena ia merupakan salah satu alat tawar menawar dengan para politisi, baik di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif. Tanpa ujian nasional, hasil pekerjaan birokrat di kementerian pendidikan nasional tak bisa dinilai baik buruknya. Jika ujian nasional cenderung positif, maka semakin kuat alasan para birokrat di kementerian pendidikan nasional untuk diprioritaskan dalam program reformasi birokrasi publik yang dipimpin langsung Wakil Presiden Republik Indonesia. Begitu pula sebaliknya.

Pihak kedua yang berkepentingan dengan ujian nasional adalah para politisi dan birokrat yang ada di daerah. Gubernur dan walikota/bupati di daerah

berkepentingan agar pelaksanaan ujian nasional di wilayah mereka sukses. Sebab, baik buruknya hasil UN akan berimbas pada citra politik mereka di mata para pemilih. Selain itu, pergerakan positif indikator pendidikan di daerah akan menjadi komoditas komunikasi politik para elit politik lokal dengan para pemilih.

Sementara itu, bagi birokrat di satuan kerja perangkat daerah yang mengelola kewenangan di sektor pendidikan dasar dan menengah, kegagalan dan keberhasilan pelaksanaan ujian nasional akan sangat menentukan seberapa besar insentif yang mereka terima dari politisi di eksekutif dan legislatif. Jika hasil ujian nasional buruk, maka karir birokrat sedang berada diujung tanduk. *Rolling jabatan* akan melanda dinas pendidikan nasional dan jajarannya.

Ada dua jenis tipe birokrat yang ada di dinas pendidikan nasional, yakni: administrator (pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural di lingkungan dinas pendidikan) dan guru (pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional). Di lihat dari sudut apapun, para guru berstatus sebagai 'bawahan' para administrator, kecuali soal otoritas keilmuan yang tak bisa disentuh para administrator. Para guru juga berkepentingan dengan hasil UN karena faktor *reward and punishment*.

Aktor terakhir yang berkepentingan dengan UN adalah siswa didik. Meski hasil UN tidak bisa dijadikan indikator utama keberhasilan siswa dalam mengarungi gelombang kehidupan, tetapi gagal UN harus dihindari karena melahirkan dampak psikologis dan sosiologis kepada siswa didik dan keluarganya.

Kecurangan = tindakan rasional

Uraian di atas menunjukkan bahwa ada banyak aktor yang berkepentingan dengan suksesnya pelaksanaan ujian nasional karena ia bersinggungan dengan pemenuhan kepentingan pribadi setiap aktor. Dalam mata rantai aktor UN ini, administrator di dinas pendidikan dan guru di sekolah merupakan ujung tombak UN. Kedua aktor ini juga memiliki posisi tawar paling lemah tatkala berhadapan dengan para politisi di eksekutif dan legislatif. Jika nilai UN anjlok, para kepala daerah dengan mudah memberikan *punishment* di satuan kerja perangkat daerah yang mengelola kewenangan di sektor pendidikan dasar dan menengah. Jika nilai UN tinggi, maka para administrator dan guru akan memperoleh *rewards*.

Jika peristiwa yang terjadi di Kabupaten Empat Lawang terbukti kebenarannya secara hukum, maka ia menunjukkan bagaimana para administrator dan guru membangun "koalisi besar" dan secara sadar mensiasati sistem ujian nasional demi meraih *rewards* dan menghindari *punishment* yang diproduksi eksekutif dan legislatif.

Siswa didik pun bertindak rasional ketika lebih memilih lembaran jawaban yang beredar ketimbang percaya dengan jawaban sendiri. Kalimat siswa yang menyatakan "*Sengaja datang pagi, pak. Kejar kunci jawaban dari guru*" (Sumatera Ekspres, 20 April 2011) menunjukkan rasa percaya siswa atas niat baik guru. Meskipun para siswa tidak tahu apa motif dan kepentingan para guru bertindak seperti itu, tetapi mereka yakin tidak mungkin seorang guru menginginkan siswa didik mereka gagal UN.

Korban UN

Yang siapa jadi korban praktek kecurangan UN? Korban pertama adalah orang tua siswa. Dengan ikhlas mereka melepaskan anak mereka untuk dididik orang

lain. Mereka percaya, sekolah modern merupakan jalur cepat untuk merubah nasib seseorang menjadi lebih baik. Mereka percaya, uang yang mereka investasikan untuk pendidikan anak mereka tidak akan terbuang percuma karena akan berbuah manis di masa mendatang. Tetapi, jika pelaksanaan UN tak kunjung membaik, maka kepercayaan orang tua terhadap sistem pendidikan nasional akan semakin memudar.

Para pihak yang terkait dengan pelaksanaan UN boleh berapologi di media bahwa indikasi kecurangan itu tidak ada, kunci jawaban yang beredar itu palsu, para guru tidak membantu siswa mengisi lembar jawaban. Tetapi, mereka tidak bisa mengendalikan informasi dan komunikasi langsung siswa dengan orang tua masing-masing. Siswa-lah yang paling tahu apakah kecurangan itu ada atau tidak.

Korban kedua adalah siswa didik. Betul, siswa diuntungkan dengan praktek kecurangan tersebut karena bisa menghindari gagal UN. Tetapi mereka dirugikan karena “terpaksa” terlibat secara langsung dalam tindakan yang tidak *sportif*, tidak *gentleman*, dan *lebay*. Ketika proses belajar mengajar yang mulia diakhiri dengan tindakan yang merusak jiwa anak didik, maka sekolah adalah candu!

Korban ketiga adalah terbengkalainya cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kepada siapa harus dibebankan tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa ini tatkala para penyelenggara pendidikan semakin terlarut dalam mindset pendidikan sebagai kontestasi politik? Semoga Indonesia bisa!